

SKRIPSI

EFEKTIVITAS BKAD BANTUL DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI PARKIR



Disusun Oleh:

ALOYSIUS CLETUS GEOVANI HAMI

13520172

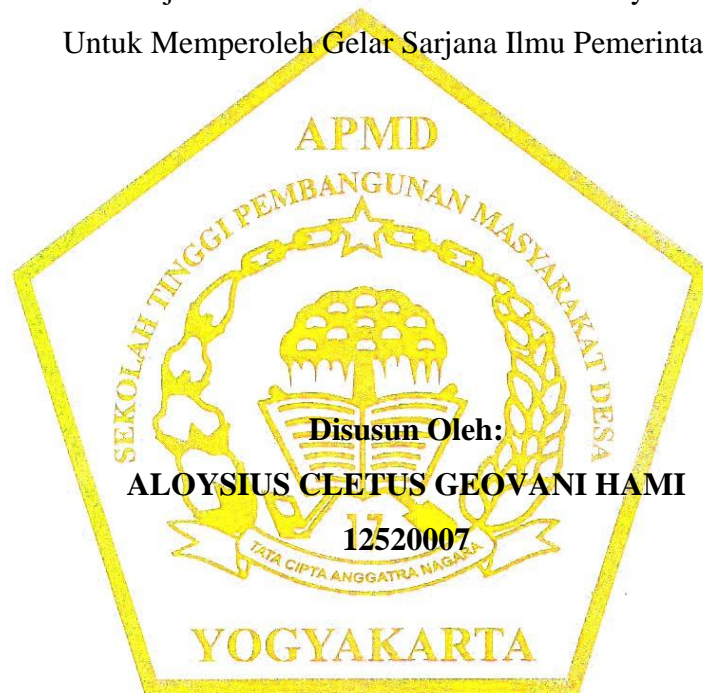
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2017

**EFEKTIVITAS BKAD BANTUL DALAM MENINGKATKAN
RETRIBUSI PARKIR**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2017**

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembanguan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 27 Oktober 2017
Pukul : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI	
NAMA	TANDA TANGAN
<u>Drs.Parwoto .M.Si</u> Ketua/Penguji/Pembimbing	
<u>Dr.Supardal .M.Si</u> Penguji Samping 1	
<u>Dra. Herawati. MPA.</u> Penguji Samping 2	



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1)


Gregorius Sahdan, S.IP., MA.

MOTTO

Kesuksesan hanya dapat di raih dengan segala upaya dan usaha yang di sertai dengan doa karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur saya panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena kasihnya dan rahmat-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan Studi di Program Strata 1 (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta.

Peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua peneliti, Bernabas Hami dan Ester Imuk. Mereka adalah orang tua yang selalu mendukung dan mensupport peneliti dalam segala bidang terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak Emirensia Yuliani Sriyati Hami, Carolina Yuniaty Imuk Hami dan Avelina Yohana Nestri Hami yang telah memberikan dorongan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
3. Kepada teman Yohanes Paulus Atarona Kadus dan Ernesto Teredi yang membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Dan informan yang telah memberikan keterangan pada saat penelitian, Khususnya Instansi BKAD Kabupaten Bantul.
5. Seluruh keluarga dari ayah dan ibu yang telah memberikan support dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini
6. Teman-teman Bidik Misi STMPD'' APMD Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa .Dimana Tuhan YME telah memberikan anugerah dan karunian-Nya .Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang Berjudul **“EFEKTIVITAS BKAD BANTUL DALAM MENINGKATKAN RETRIBUSI PARKIR** “. Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya. Maka penulis mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Habib Muhsin, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP., M.Si. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta periode 2015-2019.
3. Bapak Drs.Parwoto ,M.Si selaku pembimbing skripsi saya yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada saya sehingga terselesainya skripsi ini.
4. Dosen Penguji Samping 1(satu) Drs ,Supardal , M.Si
5. Dosen penguji samping 2 (dua) Dra.Herawati MPA
6. Bapak/ibu Dosen, yang telah banyak memberikan materi kuliah khususnya dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
7. Seluruh staff dan karyawan-karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta 30 Oktober 2017

(Aloysius Cletus Geovani Hami)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
SINOPSIS	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
1. Efektivitas Birokrasi	9
2. Pemerintah Daerah.....	16
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	20
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Unit Analisis	21
3. Teknik Pengumpulan Data.....	22
4. Teknik Analisis Data.....	24
BAB II GAMBARAN UMUM.....	26
A. Sejarah Kabupaten Bantul	26
B. Profil BKAD Bantul	31
C. Struktur BKAD Bantul	39
D. Data kepegawain BKAD Bantul	40
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	45
A.Deskripsi Informan	45

B. Analisis Hasil Penelitian	45
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR PERTANYAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komparasi target dan realisasi Pajak Parkir 2008-2011
Tabel 2.1	Tabel Kepedudukan
Tabel 2.2	Data Kepegawaian Berdasarkan Pangkat
Tabel 2.3	Data Berdasarkan Golongan
Tabel 2.4	Data Tenaga Ahli Daya.....
Tabel 2.5	Keseluruha kepegawaian BKAD
Tabel 3.1	Tabel Berdasarkan jenis kelamin
Tabel 3.2	Tabel Berdasarkan pendidikan.....
Tabel 3.3	Tabel Berdasarkan jenjang usia.....

Sinopsis

Penelitian ini berusaha untuk mendiskripsikan terkait efektivitas Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul, dalam meningkatkan retribusi parkir. Proposisi dasar dari riset ini adalah terkait bagaimana efektivitas kinerja dari para birokrat di BKAD sehingga mampu memberi atau memproduktifkan dan meningkatkan pendapatan dari sisi retribusi parkir. Alasan mendasar ini dari penulis adalah, bahwa BKAD merupakan instansi yang mengelola segala asset daerah sehingga kerja mereka harus selalu optimal demi terciptanya misi yang ada.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dengan beberapa actor kunci di BKAD itu sendiri. Sedangkan data skunder didapat dari BKAD itu sendiri, misalnya Renstra dan Profil dan sebagainya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskripsi yakni menarasikan secara lurus apa yang diperoleh dari data skunder maupun data primer itu sendiri. Selain itu mengkompatabelkan dengan teori yang dipakai untuk menganalisis lebih jauh.

Hasil dari penelitian ini dengan analisis deskriptif adalah: beberapa program yang dilakukan oleh BKAD itu sendiri memang efektif. Akan tetapi kadang juga tidak tepat sasaran. Selain itu BKAD juga cenderung menebenkan program dari instansi lain untuk menjalankan program structural misalnya peningkatan kapasitas para birokrat. Hasil lain dari penelitian ini adalah BKAD tidak jernih dalam mengurus inventarisasi, hal ini sangat berimplikasi dengan hal teknis lainnya. Sementara dalam hal tentang meningkatkan retribusi parkir belum adanya transformasi yang jelas dari BKAD itu sendiri.

Kesimpulan dari seluruh persoalan yang ada. Bahwa kedepannya sebaiknya setiap program dari BKAD dalam rangka meningkatkan retribusi parkir. BKAD penting harus memaksimalkan asset yang ada dan harus menyinkronkan seluruh kegiatannya dengan misi yang dijalankan, sehingga mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu hal yang harus dibenahi adalah, terkait inventarisasi, peningkatan kapastias melalui program internal BKAD dan pentingnya program teknis dalam rangka meningkatkan retribusi parkir itu sendiri.

Kata Kunci: *Efektivitas, BKAD, Peningkatan Retribusi*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan Daerah mengharuskan untuk diterapkannya kebijakan otonomi daerah. Meskipun dalam UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia merupakan suatu negara kesatuan (*unitary state*), pluralitas kondisi lokal baik ditinjau dari sudut kultur/adat istiadat, kapasitas pemerintahan daerahnya, suasana demokrasi lokalnya, dan latar belakang pembentukan Daerah masing-masing, mengharuskan diterapkannya kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan.¹

Berbicara dalam konteks negara kesatuan, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Namun, karena Indonesia menganut prinsip negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka terdapat tugas-tugas tertentu yang diserahkan sekaligus dilaksanakan

¹ W. Riawan Tjandra & Kresno Budi Darsono, 2009, *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah* (Pengantar Hans Atlov), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, hlm. 1

oleh Daerah, sehingga menimbulkan adanya hubungan antara Pusat dan Daerah, baik dalam bidang kewenangan, keuangan maupun pengawasan.²

Salah satu pilar pokok adanya desentralisasi ialah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi dan inisiatif masing-masing. Adanya kewenangan yang diberikan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri berarti juga Daerah tersebut berusaha mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya mengelola dan mengembangkan Daerah.³ Kewenangan yang dimaksud berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah.

Sebagai implementasi dari desentralisasi pemerintahan, Daerah dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang sejalan dengan kerangka *Good Governance*. Sehubungan dengan itu, perbincangan mengenai desentralisasi sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari administrasi pemerintahan atau birokrasi pemerintahan di Daerah. Guna melihat keberhasilan desentralisasi tentu dilihat dari ada atau tidaknya administrasi pemerintahan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh

² Yohanes Paulus Atarona Kadus, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perda APBD di DIY* (Tesis), Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UAJY, hlm. 1

³ Lili Romli, 2007, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, hlm. 34

badan dan/atau pejabat pemerintahan. Oleh karenanya, administrasi pemerintahan atau birokrasi pemerintahan di Daerah menjadi bagian esensial dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah. Dengan kata lain, administrasi pemerintahan merupakan kristalisasi dari tata kelola urusan pemerintahan yang sejalan dengan kerangka *Good Governance* selain daripada kerangka hukum yang ditentukan.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara reguler dalam ilmu politik dan administrasi publik. Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan teknologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pada akhir dasawarsa yang lalu, konsep *good governance* ini lebih dekat dipergunakan dalam reformasi sektor publik. Di dalam disiplin atau profesi manajemen publik, konsep ini dipandang sebagai suatu aspek dalam paradigma baru administrasi publik. Paradigma baru ini menekankan pada peranan manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi manajerial terutama sekali mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan Pemerintah Pusat, transparansi, akuntabilitas publik, dan diciptakan pengelolaan manajerial yang bersih bebas dari korupsi.⁴

Dalam perjalanannya, untuk mewujudkan praktik *good governance*, tentu banyak hal dan cara yang perlu dilakukan. Praktik *good governance* memerlukan perubahan yang menyeluruh pada semua unsur kelembagaan

⁴ Miftah Toha, 2003, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Rajawali Pers, hlm. 61

yang terlibat dalam praktik *good governance* meliputi Pemerintah sebagai representasi negara, pelaku pasar dan dunia usaha, serta masyarakat sipil. Ketiganya perlu diberdayakan sehingga semua dapat berperan secara optimal dan saling melengkapi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan terhadap satu unsur *governance* saja tentu tidak akan cukup apabila tidak diikuti oleh perubahan yang serupa pada unsur-unsur lainnya.⁵

Menyoal perkembangannya, birokrasi pemerintahan yang kita jalankan sekarang ini sesungguhnya belum menunjukkan adanya gerak maju menuju *good governance*. Pada masa pemerintahan Orde Baru, kekuatan-kekuatan politik militer, Golkar, maupun birokrasi Pemerintah mampu mengintervensi semua aspek kehidupan masyarakat. Birokrasi Pemerintah memposisikan diri sebagai representasi kehadiran negara. Praktik birokrasi demikian berimplikasi pada lemahnya eksistensi keberagaman di bidang sosial-politik masyarakat, dirasakan kaku, organisasi Pemerintah terbentuk secara hierarkis dari Pusat hingga Daerah, hilangnya kultur pelayanan di dalam birokrasi, sentralistik, dan berorientasi pada kekuasaan.

Setelah berakhirnya rezim Orde Baru, gerakan menuju reformasi birokrasi semakin gencar dilakukan. Adanya perkembangan politik lokal juga turut mempengaruhi perkembangan reformasi birokrasi. Selain itu, adanya rekonstruksi kewenangan Pusat dan Daerah yang memberikan keleluasaan bagi Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Daerah juga turut membantu dan mempercepat agenda demokratisasi pemerintahan.

⁵ Agus Dwiyanto, 2008, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjadarda University Press, hlm. 36

Publik mengharapkan adanya perubahan struktur, kultur dan paradigma birokrasi yang efektif-efisien, profesional, dan akuntabel.

Harus diakui bahwa harapan terbentuknya kinerja dan karakteristik birokrasi yang sejalan dengan kerangka *good governance* sampai saat ini masih sulit untuk diwujudkan. Pada satu sisi, realitas sosial, politik, dan ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang memang jauh berbeda dengan yang terjadi pada negara-negara maju. Pada sisi lainnya, pengaruh kepentingan politik, arogansi birokrasi, Korupsi-Kolusi-Nepotisme (KKN) dalam tubuh jabatan, sistem *patron client*, dan hasrat kekuasaan yang sulit dihilangkan dari aparat birokrasi di tingkat Daerah sampai saat ini, juga memberi dampak semakin pudarnya upaya reformasi birokrasi yang disuarakan dan yang diupayakan selama ini. Dalam prespektif efektivitas negara, kemampuan dan peningkatan pendapatan pajak daerah merupakan suatu pencapaian/ prestasi pengelolaan kekayaan daerah. Namun pada saat yang sama, ketika pemerintah daerah belum memiliki kapasitas yang optimal dalam pengelolaan keuangan, maka hadirnya berbagai kompleksitas masalah manajerial keuangan daerah di era desentralisasi tidak dapat dihindarkan. Bahkan adanya peluang terciptanya hambatan bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini karena secara empiris keuangan daerah merupakan sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pelayanan publik

Persoalan lain dengan narasi yang berbeda misalnya dalam studi Bambang Sunaryo & Celly Cicellia, menjelaskan kurangnya upaya

peningkatan Pendapatan Daerah di kabupaten bantul menjadi persoalan setelah adanya desentralisasi. Studi ini menjelaskan bahwa pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kabupaten Bantul sangat membutuhkan peningkatan kapasitas untuk mengatasi masalah kurang maksimalnya kontribusi penerimaan pajak parkir dalam skema PAD⁶.

Pada tataran praktis, pengelolaan pajak parkir di wilayah Kabupaten Bantul dilakukan melalui regulasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010. Dalam Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 ini, pajak parkir dipungut darisetiap penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor sebesar 30% dari tarif parkir yang dikenakan pada konsumen. Atauran ini secara implementatif diberlakukan terhadap wajib pajak parkir *self assessment*, sedangkan untuk mekanisme *flat* dilaksanakan dengan membebankan nominal yang sama yakni Rp. 15.000,00 per bulan terhadap wajib pajak. Berdasarkan laporan realisasi APBD Bantul tahun 2008- 2011, dalam kurun waktu tahun anggaran 2008-2011, nominal realisasi pendapatan pajak parkir Kabupaten Bantul selalu lebih besar dari target yang ditetapkan. Hal ini membuat setiap tahun anggaran terjadi penetapan peningkatan target perolehan pendapatan yang bersumber dari pajak parkir tersebut.

⁶ Bambang Sunaryo & Celly Cicellia, 2014, *Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Desentralisasi*, Jurnal Bina Praja, Vol 6 No 4 , Edisi Desember 2014

Tabel 1.1

Komparasi target dan realisasi pajak parkir Bantul tahun 2008-2011

Tahun	Target Perolehan Pajak Parkir	Realisasi Perolehan Pajak Parkir
2008	9.507.000.000,00	12.070.898.846,00
2009	14.036.000.000,00	14.108.451.478,99
2010	16.679.578.000,00	16.541.249.955,00
2011	30.802.000.000,00	35.068.591.776,50

Sumber:Laporan realisasi APBD Bantul tahun 2008- 2011

ini mengindikasikan adanya paradoks peningkatan kontinu perolehan pajak parkir Kabupaten Bantul setiap tahun anggaran dengan kontribusi pajak parkir tersebut dalam skema keuangan daerah Bantul. Hal ini mengingat meskipun memperoleh peningkatan pencapaian pajak parkir setiap tahun, akumulasi penerimaan pajak parkir tersebut belum mampu memberikan kontribusi berkesinambungan dalam PAD Bantul. Pajak parkir di Kabupaten Bantul belum mampu mendominasi skema PAD. Selain itu mekanisme dikotomi pemungutan pajak parkir *flat* dan *self assessment* membuat kebijakan peningkatan target penerimaan pajak parkir di Kabupaten Bantul memberikan beban tersendiri bagi wajib pajak parkir *self assessment*.

Topik ini dirasakan penting dan menarik dikarenakan permasalahan yang dibahas sering menjadi sorotan di berbagai Daerah di Indonesia saat ini termasuk Kabupaten Bantul yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian

ini. Sebagai bentuk keterbukaan informasi dan wawasan kepada publik, permasalahan hukum ini perlu dilihat sebagai permasalahan bersama dan dipahami oleh publik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat efektif-efisien, transparan, dan akuntabel. Penulis perlu meneliti dan menganalisis permasalahannya dan dinyatakan dalam solusi yang tepat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimanakah Efektivitas BKAD Bantul dalam meningkatkan retribusi parkir kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait EfektivitasBKAD Bantul dalam meningkatkan Retribusi Parkir di Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka penulisan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu dalam bidang Ilmu Pemerintahan secara khusus dalam bidang birokrasi.

2. Manfaat Praktis

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Agus Dwiyanto *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2008.
- Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief , *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Penerbit Prenada Media Group : Jakarta. 2010
- Dwiyanto, Agus. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Fisipol UGM1 995
- Dwiyanto, Agus, . *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSKK UGM. 2003
- Hetifah Sj. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, :20 prakarsa inovatif dan partisipatif di indonesia* ,Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2004
- James L. Gibson, *Organisasi : perilaku, struktur, proses* 1997
- Ichlasul Amal, , *Dalam buku Good Governance dan Otonomi Daerah; Penyunting Azhari, Itham Ibtu, dkk., Prosumen (PKPEK) dengan Forkoma-Map*, UGM,2003.
- Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Yogyakarta Pustaka Pelajar 2007.
- Marzuki Lubis, , *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD & Kepala Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*,Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Miftah Toha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta :RajaGrafindo persada,2003.
- Miftah Thoha, *Birokrasi dan pemerintah di Indonesia di Era Reformasi*, Jakarta Prenda Media Grup,2008.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 1988
- Richard M.Steers , *Efektivitas Organisasi* ,Jakarta penerbit Erlangga ,1985.

- Ravianto. Produktivitas dan Seni Usaha. Jakarta: PT. Binaman Teknika Aksara, 1989
- The Liang Gie,. *Administrasi Perkantoran*, Yogyakarta : PT. Nur Cahya. 1991.
- W. Riawan Tjandra & Kresno Budi Darsono *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah (Pengantar Hans Atlov)*, Yogyakarta :Universitas Atma Jaya, 2009
- Subarsono 2010, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Philip Quarhes Van Ufford et Osborn David, 1996, *Mewirauahakan Birokrasi: Mengtransformasi Semangat Wira Usaha Ke Dalam Sektor Publik*. Jakarta PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Robertus Robert dkk, “*Subyek yang dikekang*” *Provokasi Lacan tentang Seksuasi dan Tindakan Etis*: Salihara 2013.
- Derrida, Jacques. 1997 (ter. Gayatri C Spivak), “*Of Grammatology*”: John Hopkins University Press
- Grindle. (1997). *Getting Good Government : Capacity Building the Public Sector of Developing Countries*: Harvard Institute for International Development.
- Kuspriatni, Lista, 2009, *Studi Tentang Organisasi*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung
- Sondang P. Siagian, 1993, *Organisasi dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung
- Morison2001, et. H.R. Riyadi Soeprapto 2010, *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance*, Public: Word bank

Tesis-jurnal-skripsi (Karya Ilmiah)

- Bambang Sunaryo & Celly Cicellia, 2014, *Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Desentralisasi*, Jurnal Bina Praja, Vol 6 No 4 , Edisi Desember 2014

Susilo Bambang Yudhoyono, *Dalam buku Good Governance dan Otonomi Daerah*; Penyunting Azhari, Itham Ibtu, dkk., Prosumen (PKPEK) dengan Forkoma-Map, UGM 2003.

Kopi Apung, Artikel Tentang Birokrasi Yang Efektif dan Efisien Kamis 10 July 2013

Dikutip dari artikel, “Dokumen Kebijakan UNDP: Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan”, dalam buletin informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia 2000.

Dikutip Meuthia Ganie-Rochman, dalam artikel berjudul, “Good governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya”, yang dimuat dalam buku HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, Jakarta : Komnas HAM 2000.

Yohanes Paulus Atarona Kadus, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perda APBD di DIY* (Tesis), Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UAJY, 2017

Rencana Strategis (RENSTRA) DPPKAD Kabupaten Bantul 2016.

<https://bkad.bantulkab.go.id/data/hal/1/20/21/95-renstra-dppkad>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) silakan akses di web:

<https://kbbi.web.id/konfrontasi>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan